



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIEFKI KURNIAWAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
3. NHK : 218522

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 909.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 305.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 96.000.000
3. Tanah Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 54.400.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 50 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 106 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 127.200.000
7. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 86.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 586.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SX4 S CROSS AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOBIL, SUZUKI BALENO HATCHBACK AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000



3. MOTOR, HONDA VARIO 150 EXCLUSIVE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

4. MOBIL, DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 97.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 587.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.180.100.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.180.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.